

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keuangan, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ahmad Fadli Sumadi, 2013, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- DR. Drs. IGM Nurdjana, SH., M.Hum, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola penanggulangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- DR. Habib Adjie, SH., M.Hum, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- DR. Habib Adjie, SH., M.Hum, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, SH, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H.M. As'ad El Hafidy, 1977, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Inu Kencana Syafiie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- K. Watjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masri Singorimbun dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konpress, Jakarta.
- Musanef, 1995, *“Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia”*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Prof. DR. Amir Syarifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *“Hukum Administrasi Negara”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Gofindo, Jakarta.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Saldi Isra, 2006, *Reformasi HTN Pasca dan Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang.
- Soewarno Handyaningrat, 1994, "*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*", Haji Masagung, Jakarta.
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1950, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink Van Hoeve, Bandung.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.

### C. Lain-lain :

David Hartadi Tenggara, 2007, *Dampak Lahirnya Undang-undang Adminduk Terhadap Keabsahan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan*, Skripsi, UI, Jakarta.

Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008, UGM, Yogyakarta.

[Dindukcapil.rembangkab.go.id/data/agama](http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/agama), diakses pada hari Kamis, tanggal 28-03-2019, pukul 11.21 WIB.

Feby Yudianita, 2015, Jurnal : *Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945*, JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

Harun kami, SH, Liza Priandhini, SH, 2008, Materi Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga, FH UI, Jakarta.

Abd. Latif Bustami, 2-5 Oktober 2016, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, [https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wpcontent/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Peraturan-Perundang-Undangan-Bidang-Kepercayaan Terhadap-Tuhan-Yang-Maha-Esa-dan-Tradisi.pdf](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wpcontent/uploads/sites/6/2016/11/Makalah-Peraturan-Perundang-Undangan-Bidang-Kepercayaan%20Terhadap-Tuhan-Yang-Maha-Esa-dan-Tradisi.pdf), diakses pada hari Sabtu, tanggal 23-02-2019, pukul 14.18 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses Pada hari Rabu, tanggal 01-05-2019, pada pukul 10.58 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada hari Senin, tanggal 25-02-2019, pukul 19.23 WIB.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari Senin, tanggal 25-02-2019, pukul 19.36 WIB.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pejabat>, diakses pada hari Rabu, tanggal 06-03-2019, pukul 08.51 WIB.

[https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mahkamah konstitusi](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mahkamah_konstitusi), diakses pada hari Selasa, tanggal 12-03-2019, Pukul 11.41 WIB.

[https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/administrasi kependudukan](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/administrasi_kependudukan), diakses pada hari Rabu, tanggal 13-03-2019, pukul 09.01 WIB.

[https://www.academia.edu/5496948/Makalah\\_administrasi\\_kependudukan](https://www.academia.edu/5496948/Makalah_administrasi_kependudukan), diakses pada hari Rabu, tanggal 13-03-2019, pukul 09.45 WIB.

[https://www.jimly.com/pemikiran/makalah: Gagasan dasar tentang konstitusi dan mahkamah konstitusi](https://www.jimly.com/pemikiran/makalah:Gagasan_dasar_tentang_konstitusi_dan_mahkamah_konstitusi), diakses pada hari Kamis, tanggal 14-03-2019 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suyono (Penghayat Kepercayaan Hayuningrat), pada hari Jum'at, tanggal 08-02-2019 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dwi Karno (Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) Kabupaten Rembang, pada hari Sabtu, tanggal 09-02-2019 WIB.

Wawancara dengan Bapak Bambang Triyono (Penghayat Sapta Darma), pada hari Minggu, tanggal 10-02-2019 WIB.

Wawancara dengan Bapak Suwarno (Penghayat Palang Putih Nusantara), pada hari Senin, tanggal 25-03-2019 WIB.

Wawancara dengan Bapak Salim, S.Sos (Kepala Seksi Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, pada hari Selasa, tanggal 12-02-2019 WIB.

Wawancara dengan DR. Wira Franciska, S.H., M.H. (Notaris), pada hari Jum'at, tanggal 05-04-2019 WIB.

Wawancara dengan H. Muchamad Al Hilal, S.H., M.Kn. (Notaris), pada hari Senin, tanggal 08-04-2019 WIB.

Wawancara dengan DR. Widhi Handoko, S.H., Sp.N, (Notaris) pada hari Sabtu, tanggal 13-04-2019 WIB.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web: [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

Magister Kenotariatan

Bismillah Membangun Generasi Rabbah Unimah

Nomor : 1227/A.1/M.Kn-FH/SA/III/2019  
Lampiran : -  
Hal : **LJIN RISET**

Kepada Yth : **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rembang**  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : Denni Saputra,SH  
NIM : MKN03X18593  
Judul Tesis : **"Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Setelah Berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang"**  
Keperluan : untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin berupa wawancara dan memohon data pendukung yang berkaitan dengan judul diatas

Adapun nomor telefon mahasiswa yang bersangkutan an Denni Saputra,SH (082135164909)

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Rajab 1440 H  
22 Maret 2019 M



**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.**  
NIDN : 0604085701

Tembusan :